

Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Integrasi e-Planning dan e-Budgeting Terhadap Pencegahan Korupsi

Istirokhana Iriyani¹

Siti Mutmainnah²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Correspondences: iriyaniisti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integrasi e-planning dan e-budgeting terhadap pencegahan korupsi dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pengaruh langsung masing-masing indikator variabel integrasi e-planning dan e-budgeting yaitu Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB), penganggaran APBD, dan pengawasan terhadap pencegahan korupsi. Sampel penelitian meliputi 112 pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2021 dan 2022. Analisis data menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa integrasi e-planning dan e-budgeting berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Sistem pengendalian internal terbukti memperlemah hubungan integrasi e-planning dan e-budgeting terhadap pencegahan korupsi. Indikator ASB, penganggaran APBD, dan pengawasan berpengaruh positif, sedangkan SSH berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi. Penganggaran APBD merupakan indikator paling dominan, sedangkan ASB indikator paling lemah berpengaruh terhadap pencegahan korupsi. Implikasi praktis penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk rencana aksi pencegahan korupsi.

Kata Kunci: *E-Planning* Dan *E-Budgeting*; Pencegahan Korupsi; Sistem Pengendalian Internal.

Integration of e-Planning and e-Budgeting in Corruption Prevention: Internal Control System as Moderation

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of the integration of e-planning and e-budgeting on preventing corruption with the internal control system as a moderating variable. Another objective is to analyze the direct influence of each variable indicator of e-planning and e-budgeting integration, namely Standard Unit Price (SSH), Standard Cost Analysis (ASB), APBD budgeting, and supervision of corruption prevention. The research sample includes 112 local governments on the island of Java in 2021 and 2022. Data analysis uses the WarpPLS 7.0 application. The research results prove that the integration of e-planning and e-budgeting has a positive effect on preventing corruption. The internal control system has been proven to weaken the relationship between e-planning and e-budgeting integration and corruption prevention. ASB indicators, APBD budgeting and supervision have a positive effect, while SSH have a negative effect on preventing corruption. APBD budgeting is the most dominant indicator, while ASB is the weakest indicator in influencing corruption prevention. It is hoped that the practical implications of this research will provide input for the government in formulating more appropriate policies for action plans to prevent corruption.

Keywords: *Corruption Prevention; E-Planning And E-Budgeting; Internal Control System*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 1
Denpasar, 30 Januari 2024
Hal. 126-143

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i01.p09

PENGUTIPAN:
Iriyani, I., & Mutmainnah, S. (2024). Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Integrasi e-Planning dan e-Budgeting Terhadap Pencegahan Korupsi. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 126-143

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
15 Desember 2023
Artikel Diterima:
25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Persoalan korupsi masih menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara akibat korupsi tahun 2022 telah mengalami peningkatan 45,21% dan mencapai angka Rp 42,747 triliun (*Indonesia Corruption Watch*, 2023). Oleh sebab itu, komitmen dan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi prioritas pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan berupa upaya represif dan preventif. Salah satu strategi represif yang intensif dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Strategi OTT KPK efektif dan efisien menangkap koruptor, tetapi terbukti belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tingkat korupsi di Indonesia (Oktavianto & Abheseka, 2018). Untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi, upaya preventif perlu dilakukan secara maksimal (Singleton & Singleton, 2010). Berdasarkan empat tingkatan evaluasi keberhasilan program pencegahan korupsi yang dikemukakan oleh KPK (2022), yakni sangat rentan, rentan, waspada dan terjaga. Rata-rata pencegahan korupsi nasional pada tahun 2022 masih dikategorikan sebagai rentan (KPK, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi belum optimal dan masih harus ditingkatkan untuk mencapai kategori tertinggi, yaitu terjaga. Adanya fakta ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, faktor yang memengaruhi pencegahan korupsi agar masalah korupsi dapat diatasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan korupsi telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Nam (2018) melakukan penelitian pada 102 negara dan mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) suatu negara. Dapat diartikan, *e-government* terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Penelitian ini juga didukung Ali *et al.* (2022); Alam *et al.* (2023); Castro & Lopes (2022); Park & Kim (2019). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Cardenas & Gonzales (2023), yang menemukan bahwa *e-government* justru dapat berpengaruh negatif pada pencegahan korupsi. Sedangkan, Setyobudi & Setyaningrum (2019) dan Wang *et al.* (2022) menyatakan bahwa *e-government* tidak berpengaruh pada pencegahan korupsi.

Dari tiga komponen *fraud triangle theory*, tekanan, peluang dan rasionalisasi, peluang merupakan salah satu unsur yang dapat diminimalisir oleh suatu organisasi (Abdullahi & Mansor, 2018). Di sektor publik, peluang untuk melakukan tindakan korupsi diduga dapat dicegah dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan *e-government* (Perpres RI No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018). Penggunaan *e-government* bertujuan untuk membatasi hak akses pengguna sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga tidak ada peluang atau celah yang memungkinkan terjadinya kasus korupsi (Castro & Lopes, 2022; Paramitha & Chariri, 2021). Temuan mengenai pengaruh positif *e-government* terhadap pencegahan korupsi telah diungkapkan dalam beberapa penelitian terdahulu. Alam *et al.* (2023); Ali *et al.* (2022); Castro & Lopes (2022); Nam (2018); Park & Kim (2019) telah melakukan penelitian lintas negara dan menyimpulkan

bahwa *e-government* dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi tingkat korupsi, khususnya di negara-negara yang mengadopsi dan meningkatkan penggunaan *e-government*. Namun, fakta yang ada menunjukkan temuan ini tidak selalu konsisten. Hal ini diungkapkan dalam penelitian Cardenas & Gonzales (2023), yang menemukan bahwa variabel *e-government* berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi. Tingkat *e-government* yang tinggi justru dapat memperburuk masalah korupsi. Setyobudi & Setyaningrum (2019) dan Wang *et al.* (2022) bahkan membuktikan bahwa *e-government* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan korupsi.

Pengaruh *e-government* terhadap pencegahan korupsi telah menjadi topik menarik dalam penelitian sektor publik di berbagai negara. Bukti empiris yang diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait dampak *e-government* terhadap pencegahan korupsi. Sebagian besar penelitian (Alam *et al.*, 2023; Ali *et al.*, 2022; Castro & Lopes, 2022; Park & Kim, 2019; Setyobudi & Setyaningrum, 2019) cenderung menguji data *cross country* dengan karakteristik negara yang berbeda-beda. Terbukti penerapan *e-government* guna pencegahan korupsi di negara maju berbeda dengan negara berkembang. Selain itu, penelitian sebelumnya tentang *e-government* dan korupsi cenderung menggunakan pengukuran *e-government* yang masih luas, yakni *E-Government Development Index (EGDI)* dari PBB (Ali *et al.*, 2022; Park & Kim, 2019; Setyobudi & Setyaningrum, 2019). Adanya inkonsistensi dan variasi karakteristik pada masing-masing negara memerlukan evaluasi lebih lanjut karena belum mampu memberikan gambaran holistik mengenai pengaruhnya pada satu negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengisi kesenjangan pada penelitian-penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian ini, *e-government* merujuk pada integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*. Hal ini dikarenakan kedua komponen *e-government* tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem pengelolaan keuangan daerah (PP No.12/2019). Korupsi yang terjadi pada sektor pengeluaran serta penerimaan daerah terjadi sejak awal yaitu tahap perencanaan (KPK, 2023). ICW juga mengungkapkan bahwa modus korupsi yang tertinggi yaitu penyelewengan anggaran (ICW, 2023). Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi akan memungkinkan sistem untuk mencegah munculnya intervensi dari pihak luar. Kedua sistem tersebut akan saling mendukung dan meminimalisir peluang terjadinya korupsi (KPK, 2023a).

Sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi diyakini perlu dukungan dari sistem pengendalian internal yang kuat agar terhindar dari penyimpangan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah diperlukan untuk mengelola keuangan daerah akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Sejauh ini masih relatif jarang penelitian yang menguji peran sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi hubungan antara integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan pencegahan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul *et al.* (2019) dan Aditia *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki hubungan negatif dengan korupsi. Namun sebaliknya, Maulidi & Ansell (2022) mengungkapkan hasil yang bertentangan yaitu pengendalian internal berpengaruh negatif untuk pencegahan korupsi, akan tetapi berpengaruh positif untuk penanganan *fraud* berupa penyelewengan aset dan penipuan laporan

keuangan. Sementara itu, penelitian lain (Yusni, 2022) yang menguji sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi hubungan antara *e-procurement* dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terbukti memoderasi hubungan keduanya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan peran sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi hubungan integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap pencegahan korupsi.

Penelitian ini relevan karena merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya (Park & Kim, 2019). Pertama, penelitian ini menggunakan variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* sebagai salah satu elemen *e-government* dan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi hubungan antara integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan pencegahan korupsi. Kedua, penelitian ini memperdalam analisis yaitu dengan mempertimbangkan kontribusi dampak dari setiap indikator variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap pencegahan korupsi, yang masih jarang diungkapkan pada penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengaruh integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* secara keseluruhan belum dapat menjelaskan apakah dampak keseluruhan disebabkan oleh kontribusi yang sama atau ada perbedaan kontribusi dari masing-masing indikator variabel. Indikator variabel tersebut meliputi: Standar Satuan Harga (SSH) yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan sebagai aturan baku dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah pada periode tertentu; Analisis Standar Biaya (ASB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan; penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan pengawasan. Ketiga, pengukuran pencegahan korupsi pada penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan Indeks Persepsi Korupsi. Pengukuran pencegahan korupsi pada penelitian ini menggunakan Indeks Integritas. Indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih obyektif tentang keberhasilan program pencegahan korupsi yang telah dilakukan pemerintah daerah karena menggunakan penilaian dari pihak internal organisasi, eksternal yaitu masyarakat dan penilaian ahli terhadap keberhasilan pencegahan korupsi di suatu organisasi (Susilo *et al.*, 2018).

E-planning dan *e-budgeting* merupakan bagian dari *e-government* yang dapat digunakan untuk program pencegahan korupsi. Penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* terintegrasi akan membatasi adanya penyalahgunaan otoritas publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Tujuan pembatasan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku yang akan melakukan kecurangan terhadap sistem perencanaan dan penganggaran. *E-planning* dan *E-budgeting* yang dirancang secara online memungkinkan masyarakat dapat ikut terlibat dan mengawasi jalannya proses pengelolaan keuangan negara utamanya perencanaan dan penganggaran sehingga pencegahan korupsi dapat dimaksimalkan.

Shaowe, *et al.* (2021) membuktikan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Adanya implementasi *e-government* sangat membantu mengurangi korupsi dari perspektif pemerintah. Temuan ini juga didukung oleh Nam (2018). Semakin baik tingkat penerapan *e-government* dalam suatu negara maka korupsi akan semakin mudah untuk dicegah.

H₁: Integrasi *E-planning* dan *E-budgeting* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Korupsi.

Dalam organisasi sektor publik, teori agensi menggambarkan hubungan pendelegasian antara pihak agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat menimbulkan kemungkinan adanya konflik (Bergman & Lane, 1990). Anggaran berperan penting dalam tata kelola pemerintahan karena berfungsi sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja. Selain itu, anggaran diperlukan untuk meyakinkan kepada masyarakat (pihak prinsipal) bahwa pemerintah selaku agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Zulfiani & Biduri, 2018). Untuk membangun kepercayaan masyarakat, perencanaan dan penganggaran harus dapat menjamin bahwa sumberdaya terbatas dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas (Sirat, 2017). Ini artinya, pemerintah harus mematuhi prinsip efisiensi saat merencanakan dan menyusun anggaran agar terhindar dari adanya biaya-biaya yang tidak perlu. SSH dan ASB merupakan standar yang terintegrasi dengan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* yang akan mengurangi diskresi dalam penganggaran biaya. Indikator pada variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*, yakni SSH dan ASB, bertujuan untuk efisiensi sehingga alokasi anggaran tidak berpotensi menimbulkan *overallocated* ataupun *underallocated*. Penggunaan SSH dan ASB dalam integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* diduga akan meningkatkan pencegahan korupsi antara lain mengurangi penyelewengan dan *mark-up* anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian Venkatesh *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa menekan kebocoran biaya dan mengurangi keterlibatan agen akan memperkecil diskresi sehingga mengakibatkan peningkatan pencegahan korupsi.

H_{1a} : SSH berpengaruh positif terhadap Pencegahan Korupsi

H_{1b} : ASB berpengaruh positif terhadap Pencegahan Korupsi

Asimetri informasi merupakan kondisi yang ditimbulkan akibat salah satu pihak mempunyai informasi lebih daripada pihak lainnya (Sirat, 2017). Permasalahan keagenan yang terjadi pada sektor publik yaitu pemerintah, selaku agen, akan menjadi pihak yang memperoleh informasi lebih banyak daripada masyarakat, selaku prinsipal (Bergman & Lane, 1990). Hal ini dikarenakan, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki akses langsung terhadap informasi. Adanya asimetri informasi akan mengarah pada pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu serta mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penganggaran APBD merupakan salah satu indikator variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang berguna untuk menciptakan kualitas informasi yang baik sehingga mengurangi asimetri informasi (KPK, 2022a). Prinsip transparansi dalam indikator penganggaran APBD diduga akan berdampak pada peningkatan pencegahan korupsi. Hal ini didukung oleh penelitian Barron (2014) yang mengungkapkan bahwa asimetri informasi akan menjadi lebih rendah dengan cara meningkatkan transparansi. Transparansi dalam sektor publik adalah penyampaian tahapan APBD mulai dari Rencana APBD hingga penetapan APBD dan publikasinya.

H_{1c} : Penganggaran APBD berpengaruh positif terhadap Pencegahan Korupsi

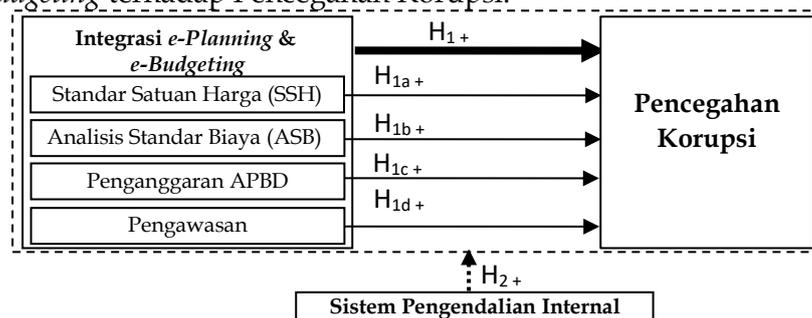
Teori agensi menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas dan pengawasan. Indikator pengawasan berupa kegiatan reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sekaligus langkah tindak lanjutnya dari masing-masing pemerintah daerah

(KPK, 2022a). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan revidi dan menindaklanjuti revidi tersebut agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Adanya indikator pengawasan dalam variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* membantu masyarakat untuk lebih meyakini bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, ketika APBD ditetapkan, proses penyusunannya sudah transparan dan mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga indikator pengawasan diduga dapat meningkatkan pencegahan korupsi. Penelitian Roemkenya *et al.* (2021) juga mengungkapkan bahwa pengawasan (audit internal) berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, termasuk korupsi.

H_{1d} : Pengawasan berpengaruh positif terhadap Pencegahan Korupsi

Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dianggap sebagai metode ideal untuk mengurangi potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (COSO, 2013). Yusni (2022) meneliti penggunaan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, dan hasilnya menunjukkan sistem pengendalian internal terbukti efektif dapat memoderasi *e-procurement* (elemen *e-government*) dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penerbitan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan utama organisasi. Salah satu hambatan utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah korupsi. Seluruh elemen yang ada dalam sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan bersinergi menjadi satu kesatuan sistem untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan diyakini akan membentuk budaya anti korupsi, yang diduga dapat memperkuat hubungan antara integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan pencegahan korupsi.

H_2 : Sistem Pengendalian Intern memperkuat hubungan integrasi *E-planning* dan *E-budgeting* terhadap Pencegahan Korupsi.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

METODE PENELITIAN

Populasi meliputi seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Pulau Jawa yang terdiri dari 6 Provinsi dan 119 Kabupaten/Kota. Alasan pemilihan unit analisis di pulau Jawa karena dalam kurun waktu dua dekade jumlah tindak pidana korupsi di Pulau Jawa tertinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia,

yaitu mencapai 437 kasus. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 karena pengukuran pencegahan korupsi mulai dilakukan secara masif pada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di tahun 2021 (KPK, 2021). Penggunaan *e-planning* dalam perencanaan Pembangunan daerah mulai dilaksanakan tahun 2018 sesuai dengan Permendagri No.98/2018, tetapi pengintegrasian dengan *e-budgeting* baru diterapkan secara penuh pada tahun 2021 setelah terbitnya Permendagri No.90 Tahun 2019 dan Permendagri No.77 yang tertanggal 30 Desember 2020. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel yaitu pemda yang memiliki skor Indeks Integritas, capaian hasil moritoring integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* termasuk skor implementasi seluruh indikatornya serta nilai maturitas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada periode observasi. Setelah diseleksi, sampel penelitian yang digunakan adalah 112 pemda di pulau Jawa sehingga jumlah observasi sebanyak 224 observasi (tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Sampel dan Data Observasi

Uraian	Jumlah
Jumlah pemda di pulau Jawa	125
Pemda tidak memiliki Indeks Integritas dari KPK	-
Pemda tidak memiliki skor integrasi <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>	-
Pemda tidak memiliki skor implementasi SSH, ASB, penganggaran APBD dan pengawasan	(13)
Pemda tidak memiliki nilai maturitas SPIP	-
Jumlah pemda yang menjadi sampel	112
Jumlah data observasi (2021-2022)	224

Sumber: Data Penelitian, 2023.

Sumber data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari KPK dan BPKP dengan teknik perolehan data berupa dokumentasi. Definisi dan pengukuran atas variabel yang menjadi fokus penelitian ini dijelaskan secara rinci pada tabel 2. Analisis data menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Perangkat lunak yang digunakan adalah Warp PLS 7.0.

Alasan penggunaan PLS-SEM karena metode ini memungkinkan menganalisis konstruk yang dibentuk menggunakan item tunggal, reflektif, dan formatif, dapat mengakomodir data penelitian yang tidak terdistribusi normal (Hair *et al.*, 2018). Penelitian ini menggunakan pengukuran formatif karena variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* dijelaskan oleh indikator variabel. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari skala ordinal dan skala rasio sehingga pemilihan metode PLS-SEM akan lebih tepat untuk penelitian ini (Hair *et al.*, 2018). PLS-SEM juga sangat berguna untuk penelitian yang memiliki model analisis jalur mencakup satu atau lebih konstruk pengukuran formatif sehingga sangat cocok untuk menganalisis hipotesis dengan variabel moderasi maupun mediasi. Tujuan PLS untuk memprediksi hubungan sebab-akibat, yaitu memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan menjelaskan hubungan teoretis diantara kedua variabel itu (Hair *et al.*, 2018).

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
Pencegahan Korupsi	"Tingkat keberhasilan upaya program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah" (KPK, 2022b)	Indeks Integritas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Skala Ordinal 1-4) Skor 00,00 s.d. 67,99 : 1 Skor 68,00 s.d. 73,69 : 2 Skor 73,70 s.d. 77,49 : 3 Skor 77,50 s.d. 100,00 : 4	KPK; Susilo <i>et al.</i> (2018)
Integrasi E-planning dan E-budgeting	"Penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara terintegrasi dengan memanfaatkan TIK" (Permendagri No.98/2018)	Hasil Penilaian <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK (Skala Rasio 0-100)	KPK
Sistem Pengendalian Internal	"Proses integral dari aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dengan maksud memberikan keyakinan agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, melalui pertanggungjawaban keuangan yang handal, dan tetap memenuhi unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menjaga aset negara yang dimiliki" (PP No.60/2008)	Maturitas SPIP (Skala Ordinal 1-5)	BPKP; Junedah (2019)
Standar Satuan Harga (SSH)	"Harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional" (KPK, 2022a)	Hasil Penilaian MCP-KPK (Skala Ratio 0-100)	KPK
Analisis Standar Biaya (ASB)	"Penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan" (KPK, 2022a)	Hasil Penilaian MCP-KPK (Skala Ratio 0-100)	KPK
Penganggaran APBD	"Tahapan penyampaian KUA/PPAS, RAPBD sampai dengan Publikasi APBD" (KPK, 2022a)	Hasil Penilaian MCP-KPK (Skala Ratio 0-100)	KPK
Pengawasan	"Reviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan tindak lanjut atas reviu perencanaan dan penganggaran" (KPK, 2022a)	Hasil Penilaian MCP-KPK (Skala Ratio 0-100)	KPK

Sumber: Data Penelitian, 2023

Salah satu tahapan penting yang harus dilaksanakan pada pendekatan PLS-SEM adalah tahap evaluasi model. Pertama, evaluasi model pengukuran (*outer model*), yang bertujuan untuk mengukur kelayakan indikator formatif dengan melihat hasil *collinearity* (VIF), dan *significant weight* (Hair *et al.*, 2018). Estimasi *weight* untuk model formatif harus signifikan, selanjutnya variabel apakah terdapat multikol dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Ringkasan *rule of thumb* evaluasi model pengukuran ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Kriteria	Parameter	Rule of Thumb
Indicator Reliability	Significant weight	$P\text{-values} < 0,05$
Collinearity	VIF	VIF<5 (Kemungkinan kolinearitas) VIF<3 (ideal)

Sumber: Hair, et al. (2018)

Kedua, evaluasi model struktural (*inner model*), yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk dengan melihat nilai *Adjusted R-Squared*, *Goodness of Fit Model*, q^2 *predictive*, *effect size* dan *full collinearity* VIF serta signifikansi koefisien jalur (Latan & Ghazali, 2017). Ringkasan *rule of thumb* evaluasi model struktural ditunjukkan pada tabel 6.

Setelah melakukan evaluasi model, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis sebanyak dua kali, pertama untuk mengetahui pengaruh integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* secara keseluruhan terhadap pencegahan korupsi serta peran sistem pengendalian internal dalam memoderasi hubungan keduanya. Pengujian kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dan kontribusi masing-masing indikator SSH, ASB, penganggaran APBD, dan pengawasan terhadap pencegahan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama sebelum melakukan pengujian hipotesis yaitu merangkum secara statistik seluruh data penelitian yang telah terkumpul. Hasil statistik deskriptif masing-masing variabel disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EPB	224	32	100	92,01	10,409
SPI	224	1	3	2,80	0,413
PK	224	1	4	2,76	5,206
SSH	224	47	100	97,53	9,173
ASB	224	2	100	87,74	22,097
APBD	224	29	100	88,75	16,819
WAS	224	22	100	93,38	15,039

Catatan : EPB = Integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*; SPI = Sistem Pengendalian Internal; PK = Pencegahan Korupsi; SSH = Standar Satuan Harga; ASB=Analisis Standar Biaya; APBD= Penganggaran APBD; WAS = Pengawasan

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode observasi, nilai maksimal EPB sebesar 100 terdapat pada 78 Kabupaten/Kota/Provinsi dan sebanyak 125 pemda yang mendapatkan skor EPB diatas nilai rata-rata (92,1). Artinya, pengintegrasian sistem *e-planning* dan *e-budgeting* sudah diimplementasikan dengan cukup baik oleh sebagian besar pemda.. Nilai variabel SPI berada di rentang 1, pada pemerintah Kabupaten Cimahi tahun 2021, hingga tingkat perkembangan tertinggi level 3 di 180 pemda. Nilai tertinggi SPI level 3 menunjukkan bahwa belum ada satupun pemda di pulau Jawa yang mampu mengimplementasikan SPI dengan sangat baik pada periode observasi mengingat rentang nilai SPI sampai dengan 5. Dapat dikatakan, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah belum efektif pada mayoritas pemda di pulau

Jawa. Skor rata-rata untuk variabel PK sebesar 2,76 menunjukkan bahwa pencegahan korupsi selama tahun 2021 dan 2022 belum optimal karena termasuk kategori rentan. Dari keempat indikator variabel, ASB mempunyai standar deviasi tertinggi (22,097). Standar deviasi dapat digunakan sebagai tolok ukur persebaran data dari nilai rata-ratanya sehingga data ASB menunjukkan variasi data yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Data dari tabel statistik deskriptif di atas juga menunjukkan adanya selisih nilai yang cukup besar antara standar deviasi dan nilai rata-ratanya. Dapat disimpulkan secara statistik, data penelitian ini memiliki sebaran nilai yang heterogen.

Dalam teknik analisis data menggunakan PLS-SEM dimulai dengan mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Penelitian ini menggunakan indikator formatif karena mendefinisikan karakteristik atau menjelaskan konstruk. Berdasarkan data-data penelitian yang diperoleh dan pengukuran variabel, keseluruhan variabel dalam penelitian ini menggunakan indikator tunggal sehingga hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan nilai *significant weight* untuk semua indikator variabel sebesar $P\text{-value} < 0,001$ dan nilai VIF sebesar 1 (tabel 5). Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah kolinearitas.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Indikator Variabel	Hasil	Rule of Thumb	Kesimpulan
EPB	Significant weight ($P < 0,001$) dan VIF = 1,00	$P\text{-values} < 0,05$ dan VIF < 3	diterima
SPI			diterima

Sumber: Data penelitian, 2023

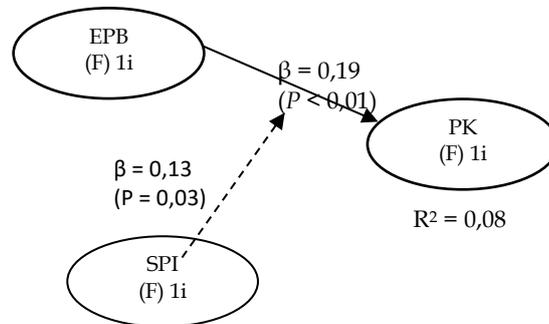
Setelah memenuhi kriteria outer model, selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural. Evaluasi dilakukan dengan melihat persentase varians yang dijelaskan dengan melihat *adjusted R-Squared*, *Goodness of Fit Model*, dan *Average Full Collinearity VIF* serta nilai *Average Path Coefficient (APC)*.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Kriteria	Hasil	P-Values	Rule of thumb	Ket
<i>Adjusted R²</i>	0,082		$\geq 0,70$ (kuat), $\geq 0,45$ (sedang), $\leq 0,25$ (lemah)	lemah
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	0,157	0,004	$P < 0,05$	diterima
<i>Average Adjusted R-Square (AARS)</i>	0,074	0,066	$P < 0,05$	tidak diterima
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	1,751		≤ 5 , ideally ≤ 3.3	diterima
<i>Average full collinearity VIF (AFVIF)</i>	1,168		≤ 5 , ideally ≤ 3.3	diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0,287		≥ 0.36 (tinggi), ≥ 0.25 (sedang), ≥ 0.10 (kecil)	sedang
<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	1		≥ 0.7 , ideally = 1	diterima
<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	1		≥ 0.7	diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dari output yang disajikan pada tabel 6. terlihat bahwa model mempunyai model fit yang baik yang ditunjukkan dengan mayoritas indikator memenuhi kriteria dalam *rule of thumb*. Setelah mengevaluasi *outer model* dan *inner model*, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram Path Model

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Variabel

Variabel	Prediksi	Path Coef	Kesimpulan
EPB → PK	+	0,187 *	Terdukung
EPB*SPI → PK	+	-0,127 **	Tidak Terdukung

Catatan : EPB = Integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*; PK = Pencegahan Korupsi; SPI = Sistem Pengendalian Internal

* Signifikan pada level 1 %, ** Signifikan pada level 5%, *** Signifikan pada level 10%

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan gambar yang menunjukkan hasil estimasi PLS-SEM, dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada tabel 7. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi dengan *path coefficient* sebesar 0,187 dan signifikan pada level signifikansi 1%. Integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan korupsi, sehingga mendukung hipotesis pertama (H1). Maknanya bahwa semakin baik tingkat implementasi integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* suatu pemerintah daerah maka akan semakin meningkatkan pencegahan korupsi. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sejalan dengan *fraud triangle theory*. Dalam teori *fraud triangle*, korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan alasan pembenar atas perilakunya (*rationalization*) (Cressey, 1953). Peluang dipandang penting dalam keputusan untuk melakukan tindakan korupsi, karena meskipun ada keinginan yang kuat untuk berperilaku koruptif namun apabila pelaku tidak mendapatkan kesempatan maka tidak ada celah bagi seseorang untuk melakukan korupsi (Abdullahi & Mansor, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang matang dan terintegrasi mampu memperkecil peluang pelaku untuk melakukan tindakan koruptif. Korupsi yang terjadi pada sektor penerimaan dan pengeluaran daerah terjadi sejak awal yaitu pada tahap perencanaan (KPK, 2023a). Kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa bahkan telah dimulai saat

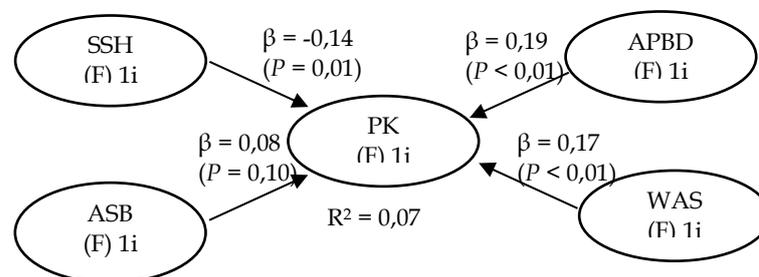
proses perencanaan anggaran pada tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan kasus korupsi penerimaan daerah, juga dapat terjadi saat pemerintah menetapkan target penerimaan yang sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Kasus penyalahgunaan anggaran yang kerap kali terjadi juga menjadi perhatian. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa kesenjangan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diminimalisir dengan menerapkan *e-government* berupa *e-planning* dan *e-budgeting*.

Dalam implementasi *e-planning*, terdapat tahapan Musrenbang yang memberikan kesempatan bagi para pihak termasuk legislatif dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengusulan program kegiatan pemerintah (Permendagri No. 86 Tahun 2017, 2017). Tahapan ini dilakukan secara terbuka di portal *e-planning* masing-masing pemerintah daerah sehingga proses perencanaan berjalan secara transparan dan dapat dikawal oleh masyarakat. Penyusunan anggaran menggunakan aplikasi *e-budgeting* yang terintegrasi dengan *e-planning* telah memberikan dampak pada berkurangnya kesempatan pelaku korupsi untuk melakukan manipulasi atas program-program yang direncanakan. Program dan kegiatan yang bukan berasal dari usulan pada tahap perencanaan, tidak akan dapat sampai pada tahapan penganggaran. Hal ini disebabkan karena proses *e-planning* dan *e-budgeting* mulai dari usulan hingga penetapan berjalan secara teratur melalui sistem dan dapat dipantau oleh masyarakat. Selain itu, adanya pembatasan akses pengguna dalam integrasi sistem tersebut memberikan keyakinan bahwa kesempatan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran semakin kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa riset sebelumnya Alam *et al.* (2023); Ali *et al.* (2022); Basyal *et al.* (2018); Castro & Lopes (2022); Nam (2018); Park & Kim (2019) yang menyatakan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Penerapan *e-government* dalam pelayanan publik mampu membatasi diskresi para pejabat publik karena adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat publik (Piatkowski, 2006).

Hasil pengujian (H2) pada tabel 7 juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal ternyata memperlambat hubungan integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap pencegahan korupsi, dengan koefisien jalur 0,019 dan tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa menutup peluang pada *fraud triangle theory* (Cressey, 1953) dengan cara memperkuat sistem pengendalian internal untuk semakin meningkatkan pengaruh integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap pencegahan korupsi tidak terdukung. Menurut Mardiasmo (2018), adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengendalian dilakukan melalui penerapan SPIP yang diyakini akan mendorong sebuah sistem perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah agar mampu mencegah korupsi. Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Jika dilihat dari statistik deskriptif, diketahui bahwa tingkat maturitas SPIP berada pada rentang nilai minimal 1 dan maksimal 3. Kondisi ini menggambarkan bahwa belum ada pemerintah daerah yang memperoleh level maturitas SPIP 4 dan 5. Karakteristik maturitas SPIP pada level 4 (terkelola dan terukur) dan level 5 (optimum)

menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi serta adanya ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan (BPKP, 2021). Belum optimalnya pencegahan korupsi, akibat penerapan SPIP yang masih belum efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Shonhadji & Maulidi, 2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak efektif untuk menangani kasus korupsi tetapi efektif untuk mengendalikan skema *fraud* yaitu penyalahgunaan aset dan penipuan laporan keuangan.

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator dari variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap variabel pencegahan korupsi dan besar kontribusinya maka dilakukan pengujian lanjutan.



Gambar 3. Hasil Pengujian Indikator Variabel

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan gambar yang menunjukkan hasil pengujian PLS-SEM terhadap indikator variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*, dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Pengujian Indikator Variabel

Uraian	Prediksi	Path Coeff	Kesimpulan
SSH → PK	+	-0,143**	Tidak Terdukung
ASB → PK	+	0,085***	Terdukung, paling lemah
APBD → PK	+	0,187*	Terdukung, paling dominan
WAS → PK	+	0,173*	Terdukung

Catatan : SSH = Standar Satuan Harga; ASB= Analisis Standar Belanja; APBD = Penganggaran APBD; WAS = Pengawasan; PK = Pencegahan Korupsi.

* Signifikan pada level 1 %, ** Signifikan pada level 5%, *** Signifikan pada level 10%

Sumber: Data Penelitian, 2023

H_{1a} menyatakan bahwa SSH berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Hasil uji menunjukkan bahwa *path coefficient* dari indikator SSH terhadap pencegahan korupsi sebesar -0.143 dan signifikan pada level signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa SSH berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1a (H_{1a}) tidak terdukung. Hipotesis 1b menyatakan bahwa ASB berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Hasil uji menunjukkan bahwa *path coefficient* dari ASB terhadap pencegahan korupsi sebesar 0,085 dan signifikan pada level signifikansi 10%. Hal ini berarti bahwa ASB berdampak positif terhadap pencegahan korupsi sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1b (H_b) terdukung. Nilai *path coefficient* 0,085 sekaligus juga menunjukkan bahwa ASB memiliki pengaruh paling lemah

terhadap pencegahan korupsi. Hipotesis 1c (H1c) menyatakan bahwa penganggaran APBD berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Hasil uji menunjukkan bahwa *path coefficient* dari penganggaran APBD terhadap pencegahan korupsi sebesar 0,187 dan signifikan pada level signifikansi 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa penganggaran APBD berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi sehingga dinyatakan hipotesis 1c (H1c) terdukung. Nilai *path coefficient* 0,187 menunjukkan koefisien yang paling besar sehingga disimpulkan penganggaran APBD memiliki pengaruh paling dominan terhadap pencegahan korupsi. Hipotesis 1d (H1d) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Hasil uji menunjukkan bahwa *path coefficient* pengawasan terhadap pencegahan korupsi sebesar 0,173 dan signifikan pada level signifikansi 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi sehingga dinyatakan hipotesis 1d (H1d) terdukung.

Hasil pengujian hipotesis lanjutan untuk menganalisis pengaruh langsung masing-masing variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap pencegahan korupsi, menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap pencegahan korupsi. ASB, penganggaran APBD dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi (H1b, H1c, H1d), sedangkan SSH justru diketahui berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi (H1a). *Agency theory* yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) dan diperkuat oleh (Bergman & Lane, 1990) menunjukkan bahwa akan ditemukan *agency problem* dalam hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dapat dihindari apabila fokus pemerintah yaitu memenuhi tuntutan publik. Akuntabilitas dan pengawasan menjadi prioritas karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan anggaran. ASB, penganggaran APBD, dan pengawasan menjadi instrumen dari variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang berperan mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel sehingga dapat memengaruhi pencegahan korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Barron, 2014; Roemkenya *et al.*, 2021; Sirat, 2017; Venkatesh *et al.*, 2016).

Indikator variabel integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* yaitu penganggaran APBD memiliki pengaruh paling dominan, sedangkan ASB memiliki pengaruh yang paling lemah terhadap pencegahan korupsi. Dari statistik deskriptif diketahui bahwa banyak pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan ASB dalam sistem perencanaan dan penganggarnya. Namun demikian, penerapan yang dilakukan hanya berupa administratif yaitu penetapan ASB dan sudah diimplementasikan (KPK, 2022a) sehingga komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ASB belum optimal. Berdasar hasil pengujian pengaruh masing-masing indikator, juga didapatkan bukti bahwa SSH berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh *et al.* (2016). Hasil ini juga berbeda dari kontribusi ketiga indikator lainnya. Jika melihat dari statistik deskriptif, menunjukkan bahwa hampir 50% pemerintah daerah telah menetapkan dan mengimplementasikan SSH dalam integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*. Namun, fakta yang ditemukan SSH justru berkontribusi negatif pada pencegahan korupsi. Sekalipun telah mengimplementasikan SSH, pemerintah

daerah harus mengkaji kembali penetapan besaran (Ednoer *et al.*, 2023). Hal ini dimungkinkan dengan SSH yang telah ditetapkan hanya dijadikan justifikasi efisiensi anggaran (Kurba, 2021). SSH yang semakin tinggi, justru semakin memperkecil perencanaan anggaran sehingga menimbulkan dampak terbukanya celah penyelewengan anggaran (Haslinda & Jamaluddin, 2016).

SIMPULAN

Integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Artinya, *e-planning* dan *e-budgeting* terintegrasi dapat membatasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara langsung serta mempersempit ruang gerak pejabat publik untuk mengubah perencanaan dan penggunaan anggaran publik yang tidak sesuai dengan ketentuan (*abuse of public power*). Akibatnya, penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pemerintahan akan semakin berkurang. Dari hasil pengujian hipotesis kedua juga disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak terbukti dapat memperkuat hubungan antara integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan SPIP yang belum efektif dan hanya disusun sebagai pedoman pemerintah. Keempat indikator variabel yaitu SSH, ASB, penganggaran APBD dan pengawasan, berpengaruh terhadap pencegahan korupsi. Namun, masing-masing indikator memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dengan mengetahui kontribusi indikator manakah yang paling dominan, masih lemah dan memerlukan perhatian khusus, selanjutnya dapat diupayakan langkah yang tepat dalam meningkatkan pencegahan korupsi. Dari keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganggaran APBD menjadi indikator yang memiliki kontribusi paling dominan dan ASB memiliki kontribusi paling lemah dan SSH memiliki kontribusi negatif terhadap pencegahan korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu periode penelitian yang relatif pendek, menggunakan data penelitian tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan ketersediaan data dari instansi terkait mulai tahun 2021. Saran untuk penelitian yang akan datang yaitu menambah periode penelitian dan melengkapi dengan metode kualitatif agar memperdalam analisis hasil penelitian. Kontribusi penelitian ini dalam hal praktik, berkontribusi dalam memberikan masukan bagi pemerintah untuk kebijakan pengelolaan perencanaan dan penganggaran selanjutnya. Peningkatan komitmen dalam integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* serta sistem pengendalian internal juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penyelewengan anggaran lebih awal (*early warning system*) agar segera dapat dilakukan tindakan korektif untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran APBD ke depan.

REFERENSI

- Abdul, S. L. M. M. S., Yusoff, H., & Mohamed, N. (2019). Factors That Might Lead to Corruption : A Case Study on Malaysian Government Agency. *International Journal of Financial Research*, 10(3), 216–229. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n3p216>
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector : understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544.

- <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- Alam, T., Aftab, M., Abbas, Z., Mannonov, K., Ugli, M., Asad, S., & Bokhari, A. (2023). Impact of E-Government Initiatives to Combat Corruption Mediating by Behavioral Intention : A Quantitative Analysis from Emerging Economies. *Sustainability*, 15(2694). <https://doi.org/10.3390/su15032694>
- Ali, M., Raza, S. A., Puah, C. H., & Arsalan, T. (2022). Does e-government control corruption ? Evidence from South Asian countries. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 258–271. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2021-0003>
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, (2021).
- Barron, O. E. (2014). Information Asymmetry and the Ex Ante Impact of Public Disclosure Quality on Price Efficiency and the Cost of Capital: Evidence from a Laboratory Market. *The Accounting Review*, 89(4), 1269–1297. <https://doi.org/10.2308/accr-50715>
- Basyal, D. K., Poudyal, N., & Seo, J. W. (2018). Does E-government reduce corruption ? Evidence from a heterogeneous panel data model. *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2017-0073>
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/095169890002003005>
- Cardenas, G., & Gonzales, R. V. (2023). Mapping of clusters about the relationship between e-government and corruption in Mexico. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 33(2), 441–457. <https://doi.org/10.1108/CR-05-2022-0064>
- Castro, C., & Lopes, I. C. (2022). E-Government as a Tool in Controlling Corruption. *International Journal of Public Administration*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2076695>
- COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework* (Issue May).
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study of the Social Psychology of Embezzlement*.
- Djefris, D., Rosalina, E., Rasyidah, Ahmad, A. W., Misra, F., & Putri, J. A. E. (2021). Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–67.
- Ednoer, E. H., Ardiansyah, S. A., & Firmansyah, A. (2023). Efektivitas pelaksanaan penganggaran dengan indikator standar biaya pada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. *Jurnalku*, 3(1), 107–118.
- Hair, J. F., Risher, J. J., & Ringle, C. M. (2018). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Haslinda, & Jamaluddin. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 11(1), 1–21.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan*

Kasus Korupsi Tahun 2022.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Junedah, L. (2019). Pengaruh Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, serta Implementasi E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Kualitas Sistem Akuntabilitas. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57618>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Survei Penilaian Integritas 2021*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022a). *Pedoman Pelaporan Pencapaian Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022b). *Survei Penilaian Integritas 2022*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Jendela Pencegahan-Koordinasi Wilayah*. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=2bc60abb>
- Kurba, M. I. H. (2021). Standar Biaya: Alat Efisiensi atau Justifikasi? *Bunga Rampai Analisis Anggaran Indonesia*. <https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/BDsSq4yGOVJvIU2>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2017). *Partial Least Squares: Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 5.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Li, S., Wei, W., & Ma, M. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence From China. *IEEE Access*, 9, 94879–94888. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3093981>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Maulidi, A., & Ansell, J. (2022). Corruption as distinct crime: the need to reconceptualise internal control on controlling bureaucratic occupational fraud. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 680–700. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2021-0100>
- Nam, T. (2018). Examining the anti-corruption effect of e-government and the moderating effect of national culture : A cross-country study. *Government Information Quarterly*, 35(December 2016), 273–282. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.005>
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur dan Skema Pengendalian Internal terhadap Antisipasi Korupsi Berjamaah Dalam Pelaksanaan APBD dengan Integritas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Benefita*, 4(3), 464–476.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2018). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 117–131.
- Paramitha, N. M., & Chariri, A. (2021). E-Government, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Capaian Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Mediasi. *E-Journal Undip*, 1–33.
- Park, C. H., & Kim, K. (2019). E-government as an anti-corruption tool : panel data analysis across countries. *International Review of Administrative Sciences*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1177/0020852318822055>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka , (2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, (2018).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2018).
- Piatkowski, M. (2006). Can information and communication technologies make a difference in the development of transition economies? *Information Technologies & International Development*, 3(1), 39.
- Roemkenya, B., Handoyo, M., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64.
- Setyobudi, C. R. A., & Setyaningrum, D. (2019). E-government and corruption perception index: a cross-country study. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 23(1), 11–20. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art2>
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2022). Is it suitable for your local governments? A contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 770–786. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0128>
- Silal, P., Jha, A., & Saha, D. (2023). Information & Management Examining the role of E-government in controlling corruption: A longitudinal study. *Information & Management*, 60(1), 103735. <https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103735>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Auditing* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Sirat, A. F. (2017). Kajian asimetri informasi dalam penentuan alokasi anggaran. *Akurasi: Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 1(1), 12–24.
- Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2018). Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi: INTEGRITAS*, 5(2), 165–189.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., Chan, F. K. Y., & Hu, P. J. H. (2016). *Managing Citizens' Uncertainty in E-Government Services: The Mediating and Moderating Roles of Transparency and Trust*. November 2023.
- Wang, L., Luo, X. (Robert), & Jurkat, M. P. (2022). Understanding Inconsistent Corruption Control through E - government Participation: Updated Evidence from a Cross - Country Investigation. *Electronic Commerce Research*, 22(3), 979–1006. <https://doi.org/10.1007/s10660-020-09444-x>
- Yusni. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang / Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indoensia*, 05, 138–148.
- Zulfiani, A. E., & Biduri, S. (2018). Perception of E-Budgeting Implementation. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 1(4), 1–13.